

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	9
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

DKI Dapat Perpanjangan Waktu

Selesaikan Pembahasan RAPBD 2020

Palmerah, Warta Kota

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta seharusnya menyerahkan dokumen Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020 paling telat 30 November 2019.

Namun, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberi perpanjangan waktu DKI Jakarta untuk menyelesaikan dokumen tersebut sebelum tanggal 31 Desember 2019.

Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Syarifuddin, mengatakan, pembahasan tersebut harus dituntaskan sebelum pelaksanaan anggaran pada tahun yang baru dimulai yakni 1 Januari 2020.

"Makanya sekarang kami tinggal tunggu. Saya berharap, saya sih masih optimis ini baru tanggal 3 Desember, maka sampai 31 Desember yang daerahnya belum sampai ini *nggak* selesai-selesai (harus diselesaikan)," ungkap Syarifuddin, Selasa (3/12).

Jika Pemprov DKI Jakarta dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan belum menyelesaikan pembahasan anggaran sebelum tenggat waktu tersebut, akan dikenakan sanksi berupa ditundanya pembayaran gaji selama enam bulan.

Aturan ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 312 ayat 2 yang berbunyi



Syarifuddin
SerambiNews.com/Fikar W Eda

"DPRD dan kepala daerah yang tidak menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 6 (enam) bulan".

"Kecuali sampai 1 Januari

belum disetujui bersama itu bisa kena sanksi administrasi," ucapnya. Selain Jakarta, ada 10 provinsi lainnya yang juga belum menyelesaikan pembahasan APBD 2020. Sedangkan yang telah menyelesaikan pembahasan sebanyak 23 provinsi. Dokumen ke-23 provinsi tersebut akan diperiksa mulai Rabu (4/12) atau terhitung tiga hari kerja sejak 30 November 2019.

Lampu merah

Syarifuddin mengingatkan kepada Pemprov DKI Jakarta dan pihak legislatif agar segera menyelesaikan pembahasan RAPBD 2020. Syarifuddin mengisyaratkan bahwa saat ini DKI Jakarta dan 10 provinsi lain yang belum menyelesaikan pembahasan itu diberi lampu merah.

"Makanya ketika ditanya sudah lampu merah? Ya. Karena aturannya 30 November harusnya selesai. Jadi bicara ketepatan waktu artinya sudah tidak tepat tapi belum kena sanksi. Kecuali sampai 1 Januari belum disetujui bersama itu bisa kena sanksi administrasi. Makanya sekarang kami tinggal tunggu," jelasnya.

Pemprov DKI Jakarta dan legislatif akan dikirim surat peringatan pada Senin (9/12). "Paling *nggak* minggu depan kami sudah harus menyurat mengingatkan yang belum. Rencana kita artinya kita sudah tau betul yang akan terlambat. Mulai hari Senin. Kami sudah siapkan surat-suratnya, tapi tidak realistis kalau ditegur sekarang," tutur Syarifuddin. (**kompas.com**)

Akhirnya Bisa Diunggah

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akhirnya mengunggah Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI tahun 2020 ke situs web apbd.jakarta.go.id, Selasa (3/12).

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jakarta, Suharti, sebelumnya memang

mengatakan, rancangan anggaran DKI tahun 2020 akan diunggah ke situs web pada Selasa (3/12), bertepatan dengan diusulkannya RAPBD 2020.

Sikap Pemprov DKI Jakarta yang tidak mengunggah rancangan anggaran 2020 sebelum disepakati bersama DPRD DKI sempat menuai polemik. Berbagai pihak menyoroti transparansi anggaran

Pemprov DKI karena tidak mengunggah dokumen rancangan anggaran.

Sri Mahendra Satria Wirawan yang saat itu masih menjabat sebagai kepala Bappeda pernah mengatakan, dokumen rancangan anggaran akan diunggah setelah KUA-PPAS disepakati bersama DPRD DKI. Menurut dia, proses pengunggahan rancangan anggaran DKI tetap sama dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, tidak ada perubahan. (**kompas.com**)